

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan Kerja

- Abdullah, Hafidz, M., Purnomo, Sulastio, Jauhari, T., & Tarmizi. (2019). Laporan Kinerja 2019. In *Bawaslu Republik Indonesia*. Bawaslu Republik Indonesia. <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/buku-laporan-kinerja-tahunan-2019>
- Aermadepa. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan. *Justitia*, 1(2), hlm1–14.
- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018). *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), hlm306–311. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>
- Amalia, P. C. (2017). Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1, Juli-September 2017), hlm76–85.
- Anggraini, T. (2019). Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu. In *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ariansyah, E., & Harahap, A. U. (2018). Modul Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. In *Bawaslu Republik Indonesia*.
- Aris, I. (2018). Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power (Kritik Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017). *Jurisprudentie*, 5(1), hlm98–114.
- Asrinaldi. (2020). *Sisi Lain Pilkada Memahami Konstestasi Politik Dari Sudut Praktis*. Erka.
- Badgja, R., & Dayanto. (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*. RajaGrafindo Persada.
- Bintoro, R. W. (2016). Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan. *Yuridika*, 31(1), hlm121–141. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1959>
- Bressman, L. S., & Thompson, R. B. (2010). The Future of Agency Independence. *Journal Vanderbilt Law Review*, 3(3), hlm0–56. http://ssrn.com/abstract_id=%0AElectronic
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (16 ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, K. (2013). *Profesionalitas Bawaslu*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/15/02131326/profesionalitas.bawaslu?page=all>.
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Rajawali Pers.
- Fahmi, K. (2019). Kepastian Hukum Pembatasan Hak Pilih Pada Pemilu 2019. In *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Bawaslu Republik

Indonesia.

- Hakim, L. (2018). Urgensi Penataan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia. In *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Kelima*. Pusako FHUA.
- Handoko, A. D., Kuncoro, G. T., & Yulianti, S. W. (2016). Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar *Judex Factie* Mengabaikan Fakta-Fakta Di Perkara Narkotika. *Jurnal Verstek*, 4(2), hlm12–20.
- Harianti, R., Effendi, N., & Asrinaldi, A. (2019). Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), hlm374–387. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.374-387>
- Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), hlm1–24. <https://doi.org/10.31078/jk1311>
- Huda, U. N. (2019). The Position and Authority of The Election Supervisory Board In Indonesian Constitutional System. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), hlm71–82. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1807>
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Perludem.
- IDEA, I. (2002). *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*.
- IDEA, I. (2010). *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan International IDEA*.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), hlm305–325.
- Irianto, S. (2002). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2, hlm155–172.
- Irianto, S. (2012). Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya. In *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan.
- Isra, S., & Fahmi, K. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Jarrett, M. (2017). *The 4 Types of Organizational Politics*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2017/04/the-4-types-of-organizational-politics>
- Jazuly, S. (2015). Independent Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Supremasi Hukum*, 4(1), hlm219–234.
- Kartika, M. (2020). *Peradilan Khusus Pemilu Kembali Diwacanakan*. republika.co.id. <https://republika.co.id/berita/qegpcq335/peradilan-khusus-pemilu-kembali-diwacanakan>
- Kelompok Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 Di Provinsi Sumatera Barat*.
- Leftwich, A. (2007). The Political Approach To Institutional Formation, Maintenance And Change. In *Paper prepared for the DFID-funded Research Programme, Institutions and Pro-Poor Growth (IPPG)*.
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), hlm51–72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>
- Lumingkewas, K. G. (2020). Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Pihak Termohon Dalam Mediasi Sengketa Proses Pemilu. *Lex Administratum*, VIII(1), hlm86–94.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2007). *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*. Mahkamah Agung RI.
- Putusan Nomor 46 P/HUM/2018, (2018).
- Marsh, D., & Gerry, S. (2010). *Theory and Methods in Political Science* (D. Marsh & G. Stoker (ed.); Third). Palgrave Macmillan. <https://books.google.com/books?id=m70cBQAAQBAJ&pgis=1>
- MD, M. (2019). *Politik Hukum Di Indonesia* (9 ed.). Rajawali Pers.
- Mediastara, Y. (2020). *Komisi II DPR Paparkan Alasan Pentingnya Peradilan Khusus Pemilu*. news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5117581/komisi-ii-dpr-paparkan-alasan-pentingnya-peradilan-khusus-pemilu>
- Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), hlm316–336. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.112>
- Noval, S. M. R., & Utomo, A. N. (2019). *Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang-Undangan*. 2(April), hlm33–38.
- Orozco, J., & Hendriquez. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (A. Ayoub & A. Ellis (ed.)). International IDEA. <http://www.idea.int/elections/ej/index.cfm>
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (ed.)). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Perludem. (2020). *Diskusi Virtual Perludem Memperkuat Keadilan Pemilu: Penataan Sengketa Proses Dalam RUU Pemilu*. <https://www.youtube.com/watch?v=-7yNvcP6tYU>.
- Pettalolo, R., Ilmar, A., Moenta, A., & Borahima, A. (2016). The Nature of General Election Supervisory Board (Bawaslu) as the Guardian of the People's Sovereignty. *International Policy Review*, 2(11), hlm36–43. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob50§ion=7
- Poggi. (2001). *Forms of Power*. Polity Press.
- Prasetyo, A. (2020). *Peradilan Khusus Pemilu Demi Kepastian Hukum*. mediaindonesia.com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/333518/peradilan-khusus-pemilu-demi-kepastian-hukum>
- Ramadani, R. (2020). Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), hlm169–192. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>
- Risnain, M. (2014). Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), hlm49–58.
- Rizqi, A., Kaban, R., Program, M., Fakultas, S., Universitas, H., & Rasji, S. H. (2019). Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), hlm1–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2839>

- Rois, I., & Herawati, R. (2018). Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), hlm267–279. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p10>
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), hlm99–113. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>
- Rumahpemiluadmin. (2020). *Peradilan Khusus Pemilu Mendesak Dibentuk*. rumahpemilu.org. <https://rumahpemilu.org/peradilan-khusus-pemilu-mendesak-dibentuk/>
- Santoso, T. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Perludem.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Saragih, A. D. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Lex et Societatis*, 5(3), hlm167–175.
- Sardini, N. H. (2018). Prinsip Satu Kesatuan Fungsi Di Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia. In *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Kelima*. Pusako FHUA.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), hlm1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Silitonga, B. M., & Rizkiyansyah, F. K. (2019). Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. In *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Supriyadi, & Kasim, A. (2020). Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), hlm676–698.
- Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Perludem.
- Suriyani, M. (2016). Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu Contradiction of Legislation Principles Mobilization in the Election Campaign. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), hlm657–679.
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2019). Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum. *Justitia et Pax*, 35(2), hlm153–175. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>
- Vickery, C. (2011). *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. International Foundation for Electoral Systems.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu Buku Pedoman Internasional IDEA*. International IDEA.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 08(1), hlm24–37.
- Wibowo. (2017). *Perilaku Dalam Organisasi* (3 ed.). RajaGrafindo Persada.

- Wiwoho, B. (2019). *Sengketa Pendaftaran Caleg, KPU dan PBB Damai Lewat Mediasi*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180731174534-32-318437/sengketa-pendaftaran-caleg-kpu-dan-pbb-damai-lewat-mediasi>
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research Design and Methods* (Third). SAGE Publications.
- Yuslim. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. , (1985).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. , (1986).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum*. , (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. , (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. , (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu*. , (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. , (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. ; (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. , (2017).
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum* (2010).
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor:81/PUU-IX/2011 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum* (2011).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46 P/HUM/2018*. , (2018).
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum*. , (2017).

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.* , (2017).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.* , (2018).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.* , (2019).

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.* , (2019).

Putusan-Putusan Bawaslu

Bawaslu Republik Indonesia, Putusan Koreksi Nomor: 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu DPW Partai Garuda dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Republik Indonesia, Putusan Koreksi Bawaslu Nomor:39/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 terkait penyampaian LPPDK DPC PAN Kota Payakumbuh.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPW Partai Nasdem dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPD Partai Gerakan Indonesia Raya dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:004/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPW Partai Kebangkitan Bangsa dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:005/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPW Partai Solidaritas Indonesia dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:006/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPW Partai Amanat Nasional dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPW Partai Berkarya dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Nomor:009/PS.REG/03.00/IX/2018 terkait sengketa proses pemilu DPW Partai Gerakan Perubahan Indonesia dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Berkarya dengan KPU Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Bulan Bintang dengan KPU Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor: 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Gerakan Indonesia Raya dengan KPU Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor: 06/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Solidaritas Indonesia dengan KPU Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor: 07/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Persatuan Indonesia dengan KPU Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 04/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Keadilan Sejahtera dengan KPU Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 05/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Hati Nurani Rakyat dengan KPU Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 08/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.08/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan KPU Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Nasdem dengan KPU Kabupaten Dharmasraya.

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Putusan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Solidaritas Indonesia dengan KPU Kabupaten Dharmasraya.

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Putusan Nomor: 002/PS.Reg/03.14/IX/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Berkarya dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Putusan Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.15/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Gerindra dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.15/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Demokrat dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Putusan Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.16/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Solidaritas Indonesia dengan KPU Kabupaten Sijunjung.

Bawaslu Kabupaten Solok, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.17/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Kebangkitan Bangsa dengan KPU Kabupaten Solok.

Bawaslu Kabupaten Solok, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.17/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Keadilan Persatuan Indonesia dengan KPU Kabupaten Solok.

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan KPU Kabupaten Tanah Datar.

Bawaslu Kota Padang, Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Berkarya dengan KPU Kota Padang.

Bawaslu Kota Padang, Putusan Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-PROV-SB.03.01/VIII/2018

Bawaslu Kota Payakumbuh, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Hati Nurani Rakyat dengan KPU Kota Payakumbuh.

Bawaslu Kota Payakumbuh, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Solidaritas Indonesia dengan KPU Kota Payakumbuh.

Bawaslu Kota Payakumbuh, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia dengan KPU Kota Payakumbuh.

Bawaslu Kota Sawahlunto, Putusan Nomor: 01/PS.REG/03.06/IX/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Demokrat dengan KPU Kota Sawahlunto.

Bawaslu Kota Solok, Putusan Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Solidaritas Indonesia dengan KPU Kota Solok.

Bawaslu Kota Solok, Putusan Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Kebangkitan Bangsa dengan KPU Kota Solok.

Wawancara

Ade Jumiarti, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020.

Akhaswita, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020.

Alhadi, Wawancara. *Video Call*. 16 Juli 2020.

Alni, Wawancara. Padang. 2 Juli 2020.

Amnasmen, Wawancara. Padang. 1 Juli 2020.

Elvys, Wawancara. *Video Call*. 13 Agustus 2020.

Erman Wadison, Wawancara. *Video Call*. 16 September 2020.

Fadli Ramadhanil, Wawancara. Padang. 27 Oktober 2020.

Feri Amsari, Wawancara. Padang. 1 November 2020.

Ilham Eka Putra, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020.

Lindo Karsyah, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020.

Rahmat Bagdja, Wawancara. *Video Call*. 28 Oktober 2020.

Rika Arnelia, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020.

Riki Eka Putra, Wawancara. Padang. 17 Juli 2020.

Suci Wildanis, Wawancara. *Video Call*. 17 September 2020.

Surya Erfitrimen, Wawancara. Padang. 2 Juli 2020.
Syafruddin Tazar, Wawancara. Padang. 14 Juli 2020.
Triati, Wawancara. *Video Call*. 16 Agustus 2020.
Yanuk Sri Mulyani, Wawancara. Padang. 1 Juli 2020.
Yeni S Tanjung, Wawancara. Padang. 25 Agustus 2020.
Yunasti Helmi, Wawancara. Padang. 14 Juli 2020.

